

RENCANA AKSI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET PER TW				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN	TARGET				PAGU
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	24.00	-	-	-	24.00	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	24.00	-	-	-	24.00	2.400.000.000
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54.50	-	-	-	54.00	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG	70.00%	-	50	70	100%	450,000,000
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Tingkat Provinsi	1 Laporan	-	-	1	1	250,000,000
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100	100	-	100	-	200,000,000
		Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	57.15	-	-	-	57.15	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan bid. Politik dan ekonomi	200 Orang	-	100	100	200	450,000,000
								Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang mengikuti Peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	-	100	-	-	100,000,000
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	-	5	5	10	350,000,000
		Persentase perempuan pada jabatan struktural	35.80	-	-	-	35.80	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi	47 Lembaga	-	47	47	47	1,500,000,000
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat provinsi	45 Lembaga	-	45	45	45	1,200,000,000
								Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	100 Orang	-	50	100	100	100,000,000
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yang terbentuk di provinsi	1 Unit	-	-	-	1	200,000,000						
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	24.00	-	-	-	20.00	290,000,000						

								Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.	Persentase Keterisian Data Terpilah pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	60.65	-	-	-	60.65	290,000,000
								Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	-	-	1	1	150,000,000
								Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	2 Dokumen	-	-	1	1	140,000,000
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan	Rasio Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Per 100.000)	8 - 10	-	-	-	8 - 10	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Per 100.000 perempuan)	8 - 10	-	-	-	8 - 10	512,400,000
								Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan	100.00	100	100	100	100	132,400,000
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1.00	-	-	-	1	82,400,000
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	10	-	-	10	-	50,000,000
		Rasio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 anak)	7,5 - 1,5	-	-	-	7,5 - 1,5	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	120,000,000
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	2	10	20	30	80,000,000
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	25 Kasus	2	10	15	25	40,000,000
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	69.00	-	-	-	69.00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	27 Lembaga	-	-	27	27	260,000,000
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	-	-	50	50	150,000,000
								Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah	1 Dokumen	-	-	1	1	110,000,000
								PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 anak)	7,5 - 1,5	-	-	-	7,5 - 1,5	1,100,000,000
								Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100,000,000
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	-	-	1	1	50,000,000

								Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	50 Orang		1	1	1	50,000,000
								Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	40 Orang	10	25	40	40	50,000,000
								Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	40 Orang	10	25	40	40	170,000,000
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan	25	5	10	15	25	950,000,000
								Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	-	1	1	1	50,000,000
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	400 Orang	-	100	200	4000	900,000,000
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak anak	Persentase Kabupaten/Kota menuju KLA	100%	-	-	100%	100%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota menuju KLA	100%	-	-	100%	100%	610,000,000
		Indeks Pemenuhan Hak Anak	59%	-	-	59%	59%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak	17 Organisasi	-	-	17	17	260,000,000
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	17 Lembaga	-	-	17	17	100,000,000
								Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	31 OPD	-	-	31	31	160,000,000
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak.	80 Lembaga	-	-	80	80	350,000,000
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1	1	1	1	100,000,000
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	1 Dokumen	-	-	1	1	250,000,000
								PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota menuju KLA	100%	-	-	-	100%	282,423,000
								Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlak kegiatan KIE kualitas keluarga	2 Media	-	-	-	2	200,000,000
								Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	-	-	-	1	200,000,000

								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan keluarga yang meningkat kapasitasnya	10	-	-	10	-	50,000,000
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50	-	-	50	-	50,000,000
								Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif	5 Kab/Kota	-	-	5	5	32,423,000
								Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	-	-	-	1	32,423,000
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	81.00	-	-	-	81.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	10,865,333,800
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	25,000,000
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	4	6	6	10,000,000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2	2	4	4	15,000,000
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan	100%	100	100	100	100	7,997,963,000
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	39	39	39	39	6,766,735,000
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1	1	1	1	956,228,000
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	33	33	33	33	210,000,000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2	2	2	2	65,000,000
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	45,000,000
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	-	2	3	-	90,000,000
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		2	2	1	45,000,000
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	753,770,800
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2	4	6	8	30,000,000
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	2	3	4	100,000,000
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	1	1	1	50,000,000
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	1	1	1	1	160,000,000
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2	2	2	2	40,000,000
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1	1	1	1	20,000,000

								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	-	-	-	2	353,770,800
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1,200,000,000
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	-	1	1	-	1,200,000,000
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	405,000,000
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	1	1	1	10,000,000
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	1	275,000,000
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	1	30,000,000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	1	90,000,000
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada PD	100%	100%	100%	100%	100%	438,600,000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	-	4	6	7	275,000,000
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Peralatan	1	2	3	5	20,000,000
								Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 website	1	1	1	1	70,000,000
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1	1	1	1	73,600,000

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan AnakProvinsi Sumatera Selatan,



FITRIANA, S.Sos.,M.Si
Nip.196903282089082002
Pembina Utama Muda /IV.C